



RELAKSASI KEBIJAKAN MONETER MELALUI GIRO WAJIB MINIMUM DAN BI RATE

Rasbin*)

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan tingkat inflasi juga harus optimum (sesuai target) karena jika tingkat inflasi mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, kecenderungan tingkat inflasi yang rendah baru-baru ini, dorongan pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung dengan relaksasi kebijakan moneter. Dari beberapa instrumen kebijakan relaksasi moneter yang tersedia, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi salah satu instrumen yang perlu disasar. Alasannya, penurunan GWM ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, instrumen lainnya, yaitu penurunan BI rate. Namun demikian, penurunan BI rate ini juga sekaligus memosisikan diri sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, BI rate dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Sebaliknya, penurunan ini juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di sisi lain, sebuah kondisi yang pada akhirnya akan menggerus cadangan devisa itu sendiri.

Pendahuluan

Firmansyah, Rektor Universitas Paramadina, mengatakan bahwa secara teoritis hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hal yang menarik. Ketika tingkat inflasi terlalu rendah, maka ia akan menekan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika tingkat inflasi yang terlalu tinggi ia pun akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, suatu besaran inflasi yang dapat membuat denyut perekonomian optimum dan sekaligus tidak menurunkan daya beli masyarakat turun diperlukan.

Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik

(BPS) merilis data inflasi nasional sebesar 0,21 persen pada November 2015. Sementara itu, inflasi pada periode Januari – November 2015 atau inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,37 persen, memecahkan rekor inflasi terendah sejak 2009, dan inflasi *year-on-year* (yoy) sebesar 4,89 persen. Tingkat inflasi ini sebenarnya masih di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 5,0 persen.

Pada saat bersamaan, *Asian Development Bank* (ADB) merilis laporannya tentang revisi pertumbuhan

*) Peneliti Muda pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: ras9bin@yahoo.co.id.



ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. ADB merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang menjadi 5,8 persen untuk 2015. Pada tahun 2016, proyeksi tersebut mencapai 6 persen, menurun dari proyeksi sebelumnya sebesar 6,3 persen. Salah satu negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya direvisi oleh ADB secara drastis adalah Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 menurun dari 5,5 persen menjadi 4,9 persen, sedangkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2016 menurun dari 6 persen menjadi 5,4 persen.

Sesuai dengan hubungan teoritis yang telah disebutkan oleh Firmansyah, ketika tingkat inflasi rendah maka pertumbuhan ekonomi pun akan rendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan agar target-target pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, bertambahnya *output* nasional, penerimaan pajak, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Karena itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi akan membuat target-target tersebut tidak akan tercapai.

Agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimum, diperlukan tingkat inflasi yang optimum (sesuai target). Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut dibutuhkan sinkronisasi kebijakan antara sektor moneter dan fiskal. Khusus untuk sektor moneter, ketika tingkat inflasi rendah, maka instrumen kebijakan moneter perlu dilakukan relaksasi. Beberapa alat atau instrumen kebijakan moneter tersebut diantaranya operasi pasar terbuka (OPT), kebijakan diskonto, pengendalian suku bunga, dan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM). Tujuannya agar tingkat inflasi menjadi optimum sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sebuah kondisi yang pada akhirnya dapat mencapai target-target pembangunan. Tulisan ini akan membahas relaksasi dua instrumen kebijakan moneter, yaitu GWM dan *BI rate*.

Pelonggaran GWM

Instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mempunyai jenis yang beragam. Dalam

rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satu jenis instrumen kebijakan moneter yang perlu dilakukan pelonggaran adalah ketentuan GWM. GWM merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan. GWM itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia dari persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) bank.

Per 1 Desember 2015, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/21/PBI/2015, BI secara resmi menurunkan GWM dari 8 persen menjadi 7,5 persen. Penurunan ini dilakukan dengan pertimbangan stabilitas makroekonomi yang semakin membaik sehingga terdapat ruang pelonggaran kebijakan moneter. Menurut Asmawi Syam, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., penurunan GWM bertujuan untuk mendorong kapasitas pembiayaan perbankan melalui peningkatan likuiditas bank. Peningkatan jumlah likuiditas tersebut akan meningkatkan jumlah likuiditas yang akan dipinjamkan oleh bank sehingga pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kredit yang disalurkan. Pada dasarnya, penurunan GWM ini bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat terealisasi.

Menurut Juda Agung, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, dampak dari penurunan GWM tersebut ke industri perbankan akan dapat dirasakan dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Namun demikian, menurutnya, penurunan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan hanya sekitar 0,6 persen. Pernyataan sebaliknya dilontarkan oleh Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan bahwa dalam kondisi perlambatan ekonomi, pelaku usaha akan cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi usaha mereka. Karena itu, pelonggaran likuiditas tidak cukup mampu mendorong ekspansi usaha mereka.

Selain itu, pelonggaran GWM juga akan menurunkan biaya dana atau *cost of fund perseroan* (bank). Alur berpikirnya, ketika GWM masih tinggi, maka likuiditas

perseroan pun akan terbatas sehingga jumlah likuiditas yang disalurkan juga terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan likuiditas tersebut, bank komersial akan meminjam dana ke bank sentral dengan tingkat bunga tertentu. Biaya pinjaman likuiditas ke bank sentral tersebut akan meningkatkan beban bunga kredit yang akan dibebankan terhadap pinjaman kredit ke nasabah. Oleh karena itu, secara umum penurunan GWM pada akhirnya akan meningkatkan permintaan kredit. Pada akhirnya, peningkatan permintaan kredit ini (terutama ke sektor riil) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Intinya, pelanggaran GWM ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan ekonomi dapat memiliki pembiayaan, yakni melalui peningkatan kredit. Oleh karena itu, agar upaya mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi berjalan optimum, Muliawan D. Haddad, Ketua Dewan Komisiner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan pemerintah bersama-sama BI dan OJK harus terus melakukan pelanggaran kebijakan.

Penurunan *BI Rate*

Ketika tingkat inflasi nasional mengalami tren penurunan atau di bawah target, BI perlu menyesuaikan tingkat suku bunga (*BI rate*) agar suku bunga riilnya tetap terjaga. Menurut Mirza Adityaswara, Deputy Gubernur Senior (DGS) BI, kebijakan penurunan GWM ini bisa saja dilanjutkan dengan memangkas suku bunga acuan atau *BI rate* untuk periode mendatang. Namun demikian, apakah penurunan tersebut cukup menjaga stabilitas, di sinilah persoalan yang harus dikelola secara hati-hati karena stabilitas merupakan hal yang penting untuk menciptakan pertumbuhan.

Kebijakan menurunkan *BI rate* memberikan konsekuensi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, penurunan *BI rate* ini akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan investasi. Seiring dengan penurunan *BI rate*, biaya investasi juga akan menurun sehingga pada akhirnya penurunan ini akan meningkatkan investasi terutama untuk sektor-sektor produktif. Implikasinya adalah sektor-sektor riil akan melakukan ekspansi dan output akan mengalami peningkatan. Menurut Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

penurunan *BI rate* dimaksudkan agar perekonomian tidak kehilangan daya-dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi yang pada akhirnya dapat menyebabkan target-target pembangunan tidak tercapai.

Di sisi lain, penurunan *BI rate* akan membuat nilai tukar rupiah tertekan terhadap dolar AS. Menurut Tony Prasetyantono, ekonom Universitas Gadjah Mada, penurunan *BI rate* akan sangat berisiko untuk melemahkan rupiah apalagi ditambah dengan kemungkinan naiknya tingkat suku bunga Bank Sentral AS (*the Fed Rate*). Penurunan *BI rate* ini dinilainya akan menyebabkan Indonesia mengalami *capital outflow*. Argumennya, melemahnya rupiah akan berpotensi menggerus cadangan devisa. Selanjutnya Tony juga menegaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan masyarakat cenderung untuk menunda belanja dan menaruh uangnya dalam bentuk DPK. Oleh karena itu, kebijakan penurunan *BI rate* dapat memposisikan dirinya sebagai buah simalakama.

Terlepas dari itu semua, Firmansyah, misalnya menegaskan perlunya kehati-hatian pemerintah atas anggapan bahwa tingginya *BI rate* menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong otoritas moneter untuk menurunkan tingkat suku bunga. Pendek kata, suku bunga bukan satu-satunya faktor yang dapat mendorong besar-kecilnya pertumbuhan ekonomi.

Penutup

Tingkat inflasi yang optimum diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar target-target pembangunan dapat tercapai. Tingkat inflasi yang optimum dapat tercapai melalui sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Untuk kebijakan moneter, tingkat inflasi yang optimum tersebut dapat dicapai melalui relaksasi kebijakan moneter. Artinya melakukan pelanggaran terhadap beberapa instrumen kebijakan moneter, misalnya, kebijakan penurunan GWM. Melalui instrumen ini, perbankan mempunyai likuiditas yang cukup sehingga akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi.

Instrumen lain kebijakan moneter yang dapat dilakukan relaksasi adalah

BI rate. Namun, penurunan *BI rate* ini memposisikan dirinya sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, penurunan *BI rate* dapat meningkatkan investasi terutama ke sektor-sektor produktif tetapi di sisi lain penurunan ini juga berpotensi menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Pelemahan ini pada akhirnya pun akan menggerus cadangan devisa.

Otoritas moneter dan instansi-instansi keuangan lainnya seperti OJK harus bisa berkoordinasi agar kebijakan pelonggaran GWM ini dapat berdampak signifikan terhadap sektor keuangan. Selain itu, juga harus bisa bersinergi agar stabilitas keuangan di Indonesia tetap terjaga sehingga memungkinkan untuk menurunkan *BI rate*. Melalui fungsi pengawasannya, DPR RI perlu memastikan kebijakan pelonggaran ini mampu efektif memengaruhi sektor keuangan terutama pertumbuhan kredit.

Referensi

- N. G. Mankiw, E. Quah dan P. Wilson. 2012. Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia, Terjemahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- “ADB Revisi Pertumbuhan Ekonomi Asia 2015: Pertumbuhan Indonesia Hanya 4,9%”, *Neraca*, 7 Desember 2015.
- “Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Neraca*, 7 Desember 2015.
- “Bankir Menilai Penurunan GWM Belum Ampuh Memacu Kredit”, <http://katadata.co.id/berita/2015/11/18/bankir-menilai-penurunan-gwm-belum-ampuh-memacu-kredit#sthash.zp2sbhBo.dpbs>, diakses tanggal 13 Desember 2015.
- “BI Isyaratkan Tinggalkan Rezim Moneter Ketat”, <http://finansial.bisnis.com/read/20151211/90/500624/bi-isyaratkan-tinggalkan-rezin-moneter-ketat>, diakses tanggal 13 Desember 2015.
- “BI Resmi Turunkan Kewajiban GWM Primer”, <http://bisnis.liputan6.com/read/2379521/bi-resmi-turunkan-kewajiban-gwm-primer>, diakses tanggal 13 Desember 2015.
- “Dua Sisi Dampak Penurunan BI Rate”, <http://katadata.co.id/berita/2015/03/04/dua-sisi-dampak-penurunan-bi-rate#sthash.yTsilyF4.dpbs>, diakses tanggal 13 Desember 2015.
- “Giro Wajib Minimum Diturunkan, BRI Siap Pacu Kredit”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/18/191552926/Giro.Wajib.Minimum.Diturunkan.BRI.Siap.Pacu.Kredit>, diakses tanggal 13 Desember 2015.
- “Pemerintah Kembali Meminta BI Turunkan Suku Bunga”, <http://katadata.co.id/berita/2015/12/07/pemerintah-kembali-meminta-bi-turunkan-suku-bunga#sthash.GzTloUMZ.dpbs>, diakses tanggal 13 Desember 2015.
- “Penurunan BI Rate Bukan Solusi Dongkrak Ekonomi RI”, <http://ekbis.sindonews.com/read/1064385/33/penurunan-bi-rate-bukan-solusi-dongkrak-ekonomi-ri-1448436758>, diakses tanggal 14 Desember 2015.
- “Penurunan Giro Wajib Minimum Primer akan Dorong Kredit 0,6 Persen”, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/11/21/penurunan-giro-wajib-minimum-primer-akan-dorong-kredit-06-persen>, diakses tanggal 13 Desember 2015.